

**PERBANDINGAN PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN
MENURUT PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN ACEH
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Putusan
Mahkamah Syariah Nomor 19/JN/2017/MS.KSG)**

**ABSTRAK
IQBAL RASYID HASIBUAN***

Perjudian adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum, baik dalam hukum positif maupun hukum islam. Dalam penerapannya terdapat dua sistem hukum yang mengatur tindak pidana judi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana perjudian,

Metode penelitian yang digunakan adalah yudis normatif dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan perundang-undangan, pendekatan Kasus dan pendekatan Konseptual.

Hasil penelitian dari tesis ini antara lain: Pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana perjudian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, diatur dalam KUHP Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Kedua, Tindak pidana judi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, Ketiga, Perjudian Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana judi online telah diatur didalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2). Pertanggungjawaban tindak pidana perjudian dalam Qanun Aceh dan KUHPidana adalah dalam hal penjatuhan sanksi bagi tindak pidana perjudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Orang yang melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni diancam dengan uqubat ta'zir berupa cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. Sedangkan dalam KUHPidana pertanggungjawaban bagi tindak pidana perjudian diancam Pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- dan bagi yang terbukti secara sah sebagai pencari, maka dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. Penerapan hokum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Mahkamah Syariah Nomor 19/JN/2017/MS.KSG, Dalam bentuk penjatuhan sanksi bagi perjudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti dan Putusan Mahkamah Syariah Nomor 19/JN/2017/ MS.KSG, terdapat perbedaan judi (maisir) dalam hukum pidana islam yang berlaku di Aceh (Qanun Aceh) dan hukum pidana positif yang berlaku di KUHPidana yaitu pada nilai taruhan dan sanksi pidana yang dijatuhkan. Dalam Qanun Aceh Uqubat pelaku maisir dan kadar maisir, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dihukum dengan hukuman uqubat Ta'zir cambuk sedangkan dalam hukum pidana positif jenis hukum yang dijatuhkan adalah pidana penjara atau denda.

Kata Kunci : Perbandingan, Sanksi, Tindak Pidana Perjudian, KUHP, Qanun Aceh

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**COMPARISON OF IMPLEMENTATION OF CRIMINAL GAMBLING SANCTIONS
ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF THE KUHP AND THE ACEH QANUN
(Study of Indonesian Supreme Court Decision Number 3/Pid.B/2018/PN.Pti and
Sharia Court Decision Number 19/JN/2017/MS.KSG)**

ABSTRACT

IQBAL RASYID HASIBUAN*

Gambling is a behavior that is against the law, both in positive law and Islamic law. In practice, there are two legal systems that regulate criminal acts of gambling. The problems studied in this study are positive legal arrangements for gambling crimes,

The research method used is normative juridical with the aim of obtaining qualitative results, so the approaches taken are statutory approaches, case approaches and conceptual approaches.

The research results from this thesis include: Positive legal arrangements for gambling crimes are regulated in several laws and regulations. First, regulated in the Criminal Code Article 303 and Article 303 bis. Second, the criminal act of gambling is regulated in Law Number 7 of 1974 concerning Controlling Gambling Jo. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1981 concerning Implementation of Gambling Control. Article 1 of Law Number 7 of 1974 concerning Controlling Gambling states that all criminal acts of gambling are crimes. Third, gambling in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions against criminal online gambling has been regulated in Article 45 paragraph (2) and Article 27 paragraph (2). The responsibility for the criminal act of gambling in the Aceh Qanun and the Criminal Code is in terms of imposing sanctions for the crime of gambling in the Aceh Qanun Number 6 of 2014 for anyone who deliberately commits a finger maisir with a bet value and/or profit of a maximum of 2 grams of pure gold, is threatened with uqubat ta'zir caning a maximum of 12 times or a fine of up to 120 grams of pure gold or imprisonment for a maximum of 12 months. Anyone who performs jarimah maisir with a bet value and/or profit of more than 2 (two) grams of pure gold is threatened with uqubat ta'zir in the form of a maximum of 30 (thirty) whips or a fine of up to 300 grams of pure gold or imprisonment for a maximum of 30 month. Whereas in the Criminal Code, liability for gambling crimes is punishable by a maximum imprisonment of 10 years or a maximum fine of Rp. 25,000,000, - and for those who are legally proven to be searching, then their right to carry out the search will be revoked. Application of law in Supreme Court Decision Number 3/Pid.B/2018/PN.Pti and Sharia Court Number 19/JN/2017/MS.KSG, In the form of imposing sanctions on gambling based on Supreme Court Decision Number 3/Pid.B/2018 /PN.Pti and Sharia Court Decision Number 19/JN/2017/MS.KSG, there are differences in gambling (maisir) in the Islamic criminal law in force in Aceh (Aceh Qanun) and the positive criminal law in force in the Criminal Code, namely the value of the bet and criminal sanctions imposed. In the Aceh Qanun Uqubat perpetrators of maisir and levels of maisir, everyone who intentionally commits Jarimah Maisir is punished with the punishment of uqubat Ta'zir caning while in positive criminal law the type of law imposed is imprisonment or a fine..

Keywords: Comparison, Sanctions, Gambling Crime, Criminal Code, Aceh Qanun

**Students of the Postgraduate Program in the Law Program at the Islamic University of North Sumatra.*